



Wisatawan Diusir dari Malioboro

JOGJA—Sejumlah pengunjung Malioboro diusir dari kawasan itu karena melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.

Catur Dwi Janati, Abdul Hamid Razak & Lugas Subarkah
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Pengetatan kawasan Tugu hingga Titik Nol terpaksa dilakukan menyusul ditemukannya banyak pelanggaran pada akhir pekan lalu.
- ▶ Uji publik belum ditentukan kapan dilakukan.

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyebutkan pada penertiban yang dilakukan Selasa (9/6) petugas terpaksa memulangkan seorang wisatawan asal Jawa Tengah yang kedapatan tak memakai masker di kawasan Malioboro. Menurutnya sudah ada sejumlah pengunjung yang terpaksa dipulangkan karena melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti tidak menggunakan masker. Heroe mengatakan untuk menuju *New Normal*, dengan mulai dilonggarkannya *social distancing*, maka pengetatan dilakukan pada *physical distancing* dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). "Itu kemarin yang lolos, seolah-olah *New Normal* itu *social distancing* longgar, *physical distancing* normal, PHBS longgar," jelasnya.



Pengetatan kawasan Tugu hingga Titik Nol terpaksa dilakukan menyusul ditemukannya

banyak pelanggaran pada akhir pekan lalu. Heroe mengatakan bagi pelaku usaha di Malioboro seperti pedagang, tukang becak, justru harus lebih ketat menegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. "Kalau ada pedagang yang tidak pakai masker sudah suruh keluar saja, kalau diperingatkan tidak mau sudah tutup saja," ujarnya.

Ketertiban Malioboro menurut Heroe menjadi tanggung jawab semua elemen untuk menjadikan kawasan tersebut aman dan nyaman bagi semua.

Heroe tidak ingin satu orang pelanggaran menyebabkan malapetaka bagi semuanya. "Agar kasus bisa ditekan, penerapan protokol kesehatan menjadi tanggung jawab semuanya," kata politikus Partai Amanat Nasional itu.

"Bisa dibayangkan, meski ini yang tidak kita harapkan, ada kasus terkonfirmasi positif di Malioboro maka kawasan tersebut kita tutup, yang rugi siapa, pelaku usaha, pemerintah juga rugi," ujar Heroe.

Dia mengatakan monitoring dan sidak akan terus dilakukan untuk mengetahui protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sudah diterapkan atau belum. Tindakan tegas diharapkan dapat membuat masyarakat mematuhi protokol pencegahan Covid-19.

▶ Halaman 10

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanjut

Wisatawan Diusir...

"Tidak ada larangan datang ke Malioboro, asalkan pakai masker, jaga jarak tidak *nyuk-nyukan*," ujarnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan dari pantauan Rabu kawasan Tugu hingga Titik Nol terjadi penurunan aktivitas warga dibandingkan akhir pekan lalu. Meski begitu Satpol PP akan terus memantau untuk menegakan protokol Covid-19.

Protokol Kesehatan

Sementara itu Pemkab Sleman meminta pengelola indeks untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan sebelum penghuni masuk indeks. Pengawasan indeks tetap dilakukan oleh masing-masing Satgas Covid-19.

Camat Depok, Sleman, Abubakar mengatakan berdasarkan SE Bupati Sleman No.443/01352 sudah diatur panduan penerimaan mahasiswa dari luar daerah. SE tersebut mengatur bagaimana tata cara mahasiswa saat kembali ke Sleman, termasuk keterlibatan perguruan tinggi, camat, kepala desa, dukuh, RT/RW dan pemilik indeks untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Untuk pemilik indeks, kata Abu, wajib mendaftarkan mahasiswa yang datang dan melaporkan ke RT setempat. Pemilik indeks juga harus menjalankan protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungannya. "Harus menyediakan fasilitas cuci tangan, menyediakan *hand sanitizer* dan mengatur agar anak indeks tidak boleh berkerumun," kata Abu saat dihubungi *Harian Jogja*, Rabu.

Di wilayah Depok, kata Abu, merupakan wilayah dengan jumlah indeks tertinggi se DIY. Jumlah indeks yang terdata resmi sekitar 5.200 unit. Baik indeks biasa maupun eksklusif. Unit-unit usaha ini tersebar di semua desa, mulai Condongcatur, Caturtunggal, dan Maguwoharjo. Adapun jumlah mahasiswa yang indeks dari

sekitar 100.000 orang.

Dengan kondisi tersebut, persiapan penerimaan mahasiswa yang kembali ke Sleman menjadi perhatian besar. "Masyarakatnya juga kami siapkan. Anak indeks yang masuk ke Sleman sehat, dan warga yang berada di sekitar indeks juga nyaman. Pengawasan SE ini tetap melibatkan Satgas masing-masing dusun hingga RT/RW," kata Abu.

Dia menjelaskan keberadaan indeks sangat membantu perekonomian masyarakat. Bahkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Depok disokong banyaknya indeks, beragam unit usaha dan jasa pendukung lainnya, mampu menyumbang triliunan rupiah. "Hampir Rp8 triliun uang yang dibelanjakan mahasiswa setahun, untuk makan, sewa kamar, operasional lainnya. Tentu saja ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat," kata Abu.

Dia berharap semua pihak baik warga, mahasiswa, pelaku usaha dan lainnya, harus saling mendukung dan mengingatkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Meskipun pemilik indeks tidak perlu meminta rekomendasi dari Satgas Covid lainnya rumah ibadah, dia meminta agar seluruh fasilitas pendukung protokol kesehatan Covid-19 harus tetap diperhatikan.

"Mahasiswa yang masuk ke Sleman kan bergelombang hingga September mendatang. Kami akan sampaikan SE Bupati ini agar masing-masing pemilik indeks menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Dukuh Bajeng, Maguwoharjo, Ikhwani Muhammad Fauzi mengatakan pemilik indeks dan RT/RW sudah diberikan informasi sesuai SE Bupati 443/01352 tersebut. "Kami terapkan sesuai arahan bupati. Mahasiswa yang indeks di sini harus membawa surat keterangan sehat dan bebas Covid," katanya.

Menurut Ikhwani, penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan demi menjaga kesehatan tidak hanya warga tetapi juga kalangan mahasiswa. Mereka

yang datang juga diminta untuk menjalani masa karantina mandiri di masing-masing indeks. "Untuk kebutuhan makannya nanti bisa diusahakan. Sementara mereka wajib melakukan karantina mandiri sebulan di sini," kata Ikhwani.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, Andi Sofyan. Meskipun sampai saat ini belum ada laporan adanya mahasiswa luar daerah yang kembali, Pemdes berharap agar semua pihak bisa proaktif untuk mengikuti aturan dalam SE tersebut. "Untuk pengawasan kami mengandalkan RT RW sebagai pemangku wilayah. Semoga semua pihak sama-sama disiplin," katanya.

Uji Publik

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji, belum mau memberitahukan kapan standar operasional dan prosedur (SOP) *New Normal* akan diuji publik. Alasannya, masih ada beberapa proses yang harus ditempuh. "Kami baru susun drafnya. Legal draf sudah selesai, tapi kami buat lampiran-lampiran," ujarnya.

Lampiran ini yang kemudian dikirimkan ke asosiasi dan kelompok terkait serta pemerintah kabupaten, kota dan instansi vertikal untuk mendapatkan masukan.

Untuk pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal, uji coba dilakukan pertama pada penataan aktivitas kantor dengan sasaran aparat sipil negara (ASN). Sementara untuk SOP layanan publik akan dilakukan oleh asosiasi yang juga diawasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Ia mencontohkan seperti hotel dan destinasi wisata, kewenangannya berada di pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan sanksi, pada SOP itu Baskara juga mewajibkan pengelola menandatangani surat pernyataan tidak melanggar.

Jika melanggar, sanksi berupa penutupan bisa dilakukan. Meski demikian, untuk penerapan sanksi, diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005